

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan (Fattah, 2000:77)

Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya, dalam memimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakikat dan ciri-ciri kemanusiaannya.

Lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia jumlahnya sangat banyak, dengan tingkatan pendidikan yang terus berkembang. Aetiap lembaga mempunyai tujuan yang berbeda beda dalam menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas serta mempunyai ciri khas masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada proses pengelolaan atau manajerial lembaga pendidikannya.

Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (Fattah, 2000:78)

Menurut Mulyasa (2005:48).

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah.(Mulyasa, 2003:193)

Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan prestasi belajar

siswa. (Triaswati dkk, 2005). Oleh sebab itu dalam konteks pembiayaan pendidikan sangat penting. Pemahaman dimaksud menentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat sekolah. Berkaitan dengan biaya pendidikan, menurut Ace Suryadi (2004:181) terdapat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu.

1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (*revenue*).
2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran
3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan
4. Anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan (Hasbullah, 2006:27).

Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Fattah, 2009:23).

Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen lain (Mulyasa, 2004:47). Komponen

pembiayaan pendidikan terutama di sekolah, selayaknya dikelola secara efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselegarnya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan sekolah/madrasah (Mulyasa, 2004:47). Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen.

Manajemen menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2006:2).

Sedangkan manajemen pendidikan Islam menurut Marno (2008:5) dapat didefinisikan sebagai.

UNIVERSITAS ISLAM INDEGENI
S Sebutuk kerja sama untuk melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia, dan finansial, fisik dan lainnya dengan menjadikan Islam sebagai landasan dan pemandu dalam praktek operasionalnya untuk mencapai tujuan organisasi (pendidikan Islam) dalam berbagai jenis dan bentuknya yang intinya berusaha membantu seseorang atau sekelompok siswa dalam menanamkan ajaran dan/atau menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam.

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Jaja dan Syarbini, 2013:73).

Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8, yang disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” serta pasal 9 yang berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”

Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orang tua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran.

Menurut Mulyono (2010).

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang

lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Berdasarkan fakta di lapangan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah/memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Terlebih di sekolah swasta, meskipun sudah mendapat dana BOS namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya (SPP). Menurut Wijaya dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan" menerangkan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan, tetapi dalam prakteknya sekolah swasta hanya mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih kecil daripada sekolah negeri.

Terkait dengan pendanaan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa "untuk membiayai pendidikan, dana

dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dana pihak asing yang tidak mengikat atau sumber dana lain yang sah". Dalam konteks ini, pihak yang paling mendapatkan tantangan pendanaan adalah sekolah/madrasah swasta. Dibanding negeri, sekolah/madrasah swasta dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu.

Pencarian alternatif sumber pembiayaan pendidikan selain BOS yang relatif baru bisa dilakukan dengan mencoba mempelajari konsep *school levy* yang mampu mengatasi persoalan dana pendidikan di Amerika Serikat (Umi Zulfa, 2012:240). Ide utama praktik *School Levy* adalah pembiayaan pendidikan dengan sumber utama dari masyarakat (pajak properti). Pajak properti biasanya dikarenakan untuk barang-barang mewah yang nyata-nyata pemilikinya orang kaya. Orang kaya dalam Islam adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan dan wajib menzakatinya ketika sudah mencapai *nishab*.

Ide utama *school levy* dipandang mirip dengan ide yang ada dalam konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Islam, yaitu ide kepedulian terhadap sesama yang diwujudkan dengan saling berbagi (Umi Zulfa, 2012:245).

Hal yang membedakan antara pembiayaan pendidikan konsep BOS dan konsep *Ziswa* adalah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebuah program pemerintah Indonesia untuk meringankan biaya operasional sekolah yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan

Bakar Minyak (PKPS BBM). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud pada PKPS BBM Bidang Pendidikan yaitu program bantuan biaya pendidikan mencakup komponen *Biaya Operasional Non Personil* dan tidak mencakup *Biaya Personil* dan *Biaya Investasi* diperuntukkan bagi seluruh SD/SDLB/MI/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, serta SMP/SMPLB/MTS/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SMP (Depdiknas dan Depag, 2006:7).

Sedangkan pembiayaan konsep *Ziswa* adalah pembiayaan pendidikan yang diambil dari potensi umat berupa zakat, Infak, Shadaqah dan yang sejenisnya (bukan pengurangan dari kompensasi manapun) dan lebih spesifik diperuntukkan untuk kelompok tertentu yang menjadi mustahiknya, konsep *Ziswa* digunakan untuk mendanai *Biaya Operasional Personil* dan *Non Personil* serta *Biaya investasi Sekolah*.

Biaya Operasional yaitu biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. Biaya operasional ini mencakup biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil meliputi, antara lain.

- a. Biaya kesejahteraan, misalnya honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur.
- b. Pengembangan profesi guru, misalnya Pendidikan dan latihan (Diklat) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain.

Biaya Operasional Non Personil merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi sekolah.

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku alat peraga, media, perabot dan alat kantor (Depdiknas dan Depag, 2006:7).

Kemudian sasaran pembiayaan konsep Ziswa pun harus beragama islam dan benar-benar kurang mampu sesuai *mustahik* yang delapan *Ashnaf*, untuk membuktikannya dalam sekolah yang menggunakan konsep Ziswa calon peserta didik perlu di *survey* terlebih dahulu untuk membuktikan tingkat perekonomiannya tetapi sebaliknya dalam pembiayaan konsep BOS sasaran peserta didik disamaratakan baik itu yang mampu atau yang kurang mampu, keduanya berhak mengikuti pendidikan secara gratis dan mendapatkan BOS.

Makna dari pembahasan zakat adalah bahwa sumber biaya pendidikan kategori biaya operasional, pemeliharaan, dan investasi bisa diperoleh dari *zakat al-amal* dengan mengacu kepada tiga kelompok yang berhak yaitu fakir, miskin, dan *fii sabilillah*. Jika kemudian masyarakat (lokal saja) mampu memberdayakan potensi umat islam dari zakat tersebut, maka persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia bisa diatasi, sebagaimana di Amerika,

masyarakat lokalnya mengalokasikan sumber pembiayaan pendidikan dari pajak properti masyarakatnya, tanpa terlalu menggantungkan alokasi dari pemerintah Pusat (Federal). Ini yang dimaksud bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengganti *tax* dalam konteks *school levy* Indonesia, Khususnya masyarakat muslim Indonesia (Umi Zulfa, 2012:247)

Di Indonesia jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah salahsatu jenjang pendidikan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam memberikan bantuan dana pendidikan secara cuma-cuma baik itu berupa dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau berupa BSM (Bantuan Siswa Miskin), namun disamping itu ada juga Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang mulai tersebar di Indonesia yang memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang bukan bersumber dari bantuan pemerintah tetapi pembiayaannya bersumber dari Zakat, Infak dan Shadaqah, salahsatu sekolah tersebut bernama SMP Juara Kota Bandung.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMP Juara Kota Bandung pada hari jumat, 20 November 2015, ditemukan bahwa SMP Juara yang berada di Komplek. Taman Cipadung Indah, RT 06/RW 01, Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung merupakan salah satu model pendidikan formal berkarakteristik Islam dan tidak memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa, yang *notabene* adalah masyarakat tidak mampu. Adapun dana pendidikan SMP Juara diperoleh dari Rumah Zakat yang merupakan salah satu lembaga umat Islam yang mengumpulkan donasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.

SMP Juara adalah salah satu program pendidikan formal Rumah Zakat untuk jenjang SD dan SMP yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun tidak ada pungutan biaya, sarana prasarana di SMP Juara juga lebih dari cukup dan peserta didik di SMP Juara tidak sedikit dari mereka yang meraih prestasi-prestasi yang membanggakan serta bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh dan memunculkan beberapa masalah mendasar diantaranya : Apa yang menjadi latar belakang adanya model pembiayaan seperti itu? bagaimana strateginya? Apa landasan teori yang menjadi afiliasi ilmu atau pendekatan teorinya? Bagaimana langkah-langkah atau manajemennya? Bagaimana hasil yang telah dicapai selama ini? dan apa faktor penunjang dan penghambatnya?

Berdasarkan dari fenomena diatas, dan atas dasar pentingnya masalah tersebut untuk diteliti dan dikembangkan, maka masalahnya akan diteliti dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif, dengan judul "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat (Penelitian di SMP Juara Kota Bandung)*".

B. Perumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat di SMP Juara Kota Bandung. Masalah tersebut dirinci dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana latar alamiah SMP Juara Kota Bandung?

2. Bagaimana penggaran pembiayaan pendidikan (*Budgeting*) berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan (*Actuating/Accounting*) berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung?
4. Bagaimana pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan pendidikan (*Auditing*) berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung?
5. Apa faktor penunjang dan penghambat pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung?
6. Bagaimana keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan manajemen pembiayaan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui latar alamiah SMP Juara Kota Bandung
2. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan (*Budgeting*) pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pendidikan (*Actuating/Accounting*) berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung;
4. Untuk mengetahui pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan pendidikan (*Auditing*) berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung;
5. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung;

6. Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep atau teori tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan bahan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang berminat meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran, pengalokasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di sekolah swasta.
- b) Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan konsep manajemen pendidikan khususnya dalam pengembangan konsep manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah khususnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, pemanfaatan dana secara efisien dan mengalokasikannya secara tepat sesuai dengan skala prioritas sehingga mendukung kinerja yang efektif.

- b) Secara spesifik diharapkan berguna sebagai inspirasi bagi lembaga pendidikan Islam untuk menjadikan zakat sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:870), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen pembiayaan pendidikan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Menurut George R. Terry (dalam Mulyono, 2008:16) menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggantian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lain-lain

Pengertian lain disampaikan oleh Hasibuan (dalam Mulyono, 2008:18) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, Mulyono (2008:16) menyimpulkan pengertian manajemen dari pendapat beberapa ahli, bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerjasama orang-orang lain.

Menurut Sudjana (2004:14), manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mengdayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan.

Menurut pendekatan sistem biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, kegiatan tersebut disebut efektif dan efisien (Anwar, 2013:210). Sedangkan definisi pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:187) merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa (Mulyono, 2010:71). Biaya juga merupakan nilai barang jasa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang membentuk pendapatan. Mulyono (2010:75) juga menyatakan bahwa biaya biayaan pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan. Produsen, penjual, dan konsumen pendidikan menyatukan diri ke dalam satu transaksi ekonomi di bidang pendidikan.

Menurut Suryosubroto (2004:26) menyatakan bahwa pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dari

perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Pengertian lain pembiayaan pendidikan menurut Fattah (2009:23) merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. (Yusuf Qardawi, 2010:34)

Menurut terminologi Syariat (istilah), zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. (Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2008:2)

Menurut hukum Islam zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat – sifat tertentu dan di berikan untuk golongan tertentu. Selain itu terdapat juga istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat sedangkan shadaqah sunnah dinamakan infaq, sebagian yang lain mengatakan infaq wajib di sebut zakat dan infaq sunnah di sebut shadaqah. Menurut fiqih Islam, zakat

berarti harta yang wajib di keluarkan dari kekayaan orang kaya untuk di sampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang di tentukan dalam syara.

Sedangkan Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkan. Menurut Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat itu memberikan suatu bagian dalam harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang bersifat tidak bertentangan dengan syara yang tidak memperbolehkan kita memberikan kepadanya. (Budi Prayitno, 2006:58)

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, kita dapat menemukan pendapatnya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi inti dari prinsipnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa zakat zakat adalah bagian dari harta dengan prasyarat tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan prasyarat tertentu.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2007:8) penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis sebagai landasan afiliasi ilmunya. Atas dasar itu, ketiga hal di atas dijadikan dasar sistimatisasi rumusan masalah untuk menganalisis deskriptif manajemen

pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung. Kajian ini terkait dengan ide dan alasan dipilihnya suatu manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat dan konsepnya; perencanaan, aktifitas kegiatan pelaksanaannya, evaluasi, dan hasil produk yang dicapainya.

Faktor penunjang adalah segala hal yang membantu dan mendukung terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam mencapai tujuan. Sedangkan faktor penghambat adalah segala hal yang dapat mempengaruhi, memperlambat terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam meraih tujuan.

Faktor penunjang dan faktor penghambat dapat bersumber dari faktor intern maupun faktor ekstern. Pengkajian terhadap faktor penunjang dan penghambat merupakan usaha untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem, sehingga dengan ditemukannya faktor-faktor itu dapat meningkatkan sebuah proses manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola lembaga pendidikan yang ada. Kajian mengenai faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pada tingkat keberhasilan sebuah manajemen, dengan mengetahui faktor-faktanya akan bisa diukur keberhasilannya dengan upaya melaksanakan faktor-faktor penunjangnya, dan meminimalisir faktor-faktor yang menghambatnya.

Suatu konsep manajemen akan ditiru dan diterapkan pada tempat dan lembaga lain yang memiliki suatu kesamaan jika dianggap berhasil. Keberhasilan sebuah konsep manajemen pada suatu lembaga pendidikan akan ditiru jika dianggap berhasil. Untuk itu, kajian keberhasilan yang terukur mengenai penerapan suatu konsep manajemen merupakan hal penting untuk

diungkapkan agar pengguna hasil penelitian dapat mengambil manfaat secara optimal.

Secara skematis Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam gambar bagan seperti pada halaman berikut :



E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam langkah penelitian ini dijelaskan tahapan langkah yang dilakukan dalam proses penelitian ini yang meliputi : (1) jenis data dan pendekatan penelitian, (2) sumber data, (3) metoda dan teknik pengumpulan

data, (4) langkah analisis data, dan (5) teknik pemeriksaan uji absah data. Secara rinci kelima tahapan tersebut diurai sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data pokok yang dikumpulkan adalah jenis data Kualitatif, yakni data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yang berkaitan dengan latar alamiah dan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung. Secara relative ada pula data kuantitatif terkait data subyek penelitian dan sarana sebagai data pelengkap.

Bentuk pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomena yang merupakan turunan dari filosofi fenomenologi. Objek ilmu tidak terbatas pada yang empiris, melainkan mencakup fenomena seperti persepsi, pemikiran. Metode kualitatif ini ini dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Disamping itu juga metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui (Ansel Straus, 2005:5)

Sifat pendekatan penelitian kualitatif berupa terbuka, dalam hal ini bermakna bahwa peneliti memberikan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan yang diajukan menurut kerangka berpikir mereka sendiri, bukan berdasarkan patokan-patokan jawaban yang telah dibuat peneliti.

2. Menentukan Sumber Data

a. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menentukan tempat penelitian di SMP Juara yang beralamat di Komplek Taman Cipadung Indah, RT 06/RW 01, Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung, dengan alasan adanya masalah yang akan diteliti terkait dengan manajemennya yang dianggap unik dan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan Islam, serta pihak pengurus mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

b. Sumber Data

1) Sumber data Primer

Sumber data Primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang yang dapat diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dalam penelitian ini merupakan sumber data utama, dengan menggunakan teknik sampling, yaitu dengan cara mewawancarai kepada pihak kepala sekolah sebagai *Key Informan*, kemudian diikuti dengan *Snow Ball Process*, yaitu sumber data berikutnya diperoleh dari *key informan* tersebut secara bergulir, dan baru dihentikan apabila terjadi pengulangan informasi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan menunjang dalam penelitian, seperti berupa

dokumen, arsip, buku-buku referensi, dan sumber data lainnya yang dapat menunjang terhadap sumber data penelitian mengenai SMP Juara Kota Bandung, khususnya mengenai manajemen pembiayaan pendidikannya yang berbasis zakat.

3. Menentukan Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Menentukan metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang terjadi atau berlangsung secara rinci apa adanya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu:

1) Teknik Observasi Partisipasi

Observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipasi aktif yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data tentang manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung. Peneliti melakukan pengamatan dan terlibat ikut serta sebagai peserta pengamat selama beberapa bulan di lokasi.

2) Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan *Key Informan*, dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Juara Kota Bandung, Kepala Bagian Tata Usaha, Bendahara Sekolah, Kepala Rumah Zakat (atau yang mewakilinya),

Pimpinan *Indonesia Juara Foundation*. Wawancara menggunakan model wawancara terbuka; untuk mengumpulkan data tentang masalah pokok yang diteliti, khususnya untuk verifikasi data dan mengenai hal-hal terkait alasan digunakan suatu manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung.

3) Teknik Dokumentasi atau Teknik Menyalin

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tertulis mengenai SMP Juara Kota Bandung dan setting penelitian lainnya seperti struktur kepengurusannya, data tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dokumen sejarah berdirinya serta data tertulis dari Lembaga Rumah Zakat. Melalui proses penelusuran dokumen, buku-buku referensi, data yang ada dijadikan bahan data pokok dan data tambahan untuk melengkapi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini harus dianalisis terlebih dahulu secara benar dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, lebih menekankan pada diskripsi secara alami (Arikunto, 2006: 12). Adapun tahapan langkah analisis yang dilakukan, yaitu.

a. Unitisasi yaitu pemrosesan satuan. Dalam unitisasi ini, terdapat langkah-langkah yang dilakukan yaitu.

1) Mereduksi data, maksudnya yaitu memilih data dari berbagai sumber yang relevan dengan data yang diinginkan.

2) Memberi Kode, Maksudnya memberi Kartu Indeks yang berisi satuan-satuan, kode-kode dapat berupa penandaan sumber asal satuan seperti catatan lapangan, penandaan lokasi, dan penandaan cara pengumpulan data.

b. Kategorisasi data yaitu proses pengelompokan data yang telah terkumpul dalam kategorisasi ini. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu diantaranya.

1) Mereduksi data, maksudnya memilih data yang sudah dimasukkan kedalam satuan dengan cara membaca satuan yang sama. Jika tidak sama maka akan disusun kembali untuk membuat kategori baru.

2) Membuat koding, maksudnya memberikan nama atau judul terhadap satuan yang mewakili entri pertama dari kategori.

3) Menelaah Kembali seluruh Kategori

4) Melengkapi data-data yang telah terkumpul untuk ditelaah dan dianalisis.

c. Penafsiran data

Penafsiran dilakukan dengan cara memberi penafsiran-penafsiran logis dan empiris berdasarkan data yang terkumpul

selama penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah “deskripsi semata-mata” dengan menggunakan “pendekatan fenomenologis” dan teori mengenai “manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat” sebagai alat sistematisasi analisis.

5. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka data yang terdapat pada hasil penelitian ini perlu diuji keabsahannya. Untuk itu maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah terkumpul dengan kriteria kepastian logika, dapat dipertanggungjawabkan, dengan proses kerteralihan dan ketergantungan secara relevan sesuai dengan keakuratan data yang diperoleh, serta menggunakan teknik pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data tersebut. Adapun langkah pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut.

a. Perpanjangan keikutsertaan, hal ini dilakukan untuk mendeteksi serta menghitung distorsi yang mungkin dapat mengotori data.

Perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan dengan tinggal di lokasi penelitian dan terlibat dalam berbagai kegiatan dengan waktu sekitar tiga bulan atau lebih, yaitu sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 14 Juni 2016.

b. Ketekunan pengamatan, maksudnya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, diteliti, untuk memperdalam dan

mengarahkan data supaya lebih terfokus. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap berbagai aktivitas dalam proses manajemen di SMP Juara Kota Bandung, mencatat serta merekam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksud memperdalam dan lebih terfokus.

- c. **Triangulasi**, yaitu dengan pengecekan hasil wawancara dan pengamatan kepada sumber yang berbeda serta membandingkan data hasil penelitian dokumen dengan pengamatan serta dengan melalui wawancara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi disinformasi dalam melakukan penelitian ini.
- d. **Pemeriksaan teman sejawat**, dilakukan dengan cara didiskusikan kepada dosen pembimbing atau kepada teman mahasiswa yang sama sedang melakukan penelitian mengenai hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh untuk memperbaiki dan melengkapi hasil sementara penelitian.
- e. **Analisis kasus negative**, dilakukan dengan cara mengumpulkan, contoh-contoh serta kasus-kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang terkumpul untuk digunakan sebagai bahan pembanding.
- f. **Kecukupan referensi**, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyak terkait dengan setting dan fokus penelitian. Melengkapinya dengan cara menanyakan langsung kepada pihak

kepala Sekolah, serta mencari informasi dari sumber lain, termasuk referensi dari sumber tertulis.

- g. Pengecekan anggota,** dilakukan dengan cara memeriksa dan melaporkan data hasil penelitian kepada sumbernya (pihak kepala sekolah), guna menyamakan persepsi antara peneliti dengan pihak sumber yang diteliti.
- h. Uraian rinci,** dilakukan dengan cara melaporkan hasil penelitian secara rinci dan lebih cermat, dimaksudkan agar proses keteralihan informasi seperti yang terdapat di lokasi.
- i. Auditing untuk kriteria kebergantungan,** proses auditing dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan auditor (pembimbing) untuk menentukan apakah penelitian ini perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan sesuai dengan lengkap tidaknya data yang terkumpul.
- j. Auditing untuk kriteria kepastian,** proses auditing dilakukan dengan cara memeriksakan data atau mengadakan klarifikasi data yang terkumpul kepada subjek penelitian, dalam hal ini kepada ketua dan bendahara SMP Juara Kota Bandung. Bukti keabsahan data hasil dari pemeriksaan data tersebut dibuktikan dengan surat persetujuan atau pernyataan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan sebenarnya dari kepala Sekolah SMP Juara Kota Bandung.

F. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini bukan hal yang baru, di dunia akademik telah banyak karya-karya seperti itu penulis menyadari bahwa apa yang akan diteliti ini ada kemiripan yang telah ditulis sebelumnya, kajian pustaka terhadap karya yang terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan guna membantu pembahasan penelitian di lapangan. Diantara kajian pustaka yang mencangkup tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan berbasis zakat ialah.

1. Anwar, Idochi. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, buku tersebut berisi tentang berbagai konsep teori dan isu yang emrpakan hal intiyang harus dipikirkan untuk mendekati masalah-masalah administrasi pendidikan, seperti visi, profesionalisme, dan pembiayaan pendidikan, lesemuanya dijabarkan kedalam sepuluh bab pembahasan.
2. Umi Zulfa, Media Pendidikan (Jurnal Pendidikan Islam), Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XXVII No. 2 hal. 239-254 tahun 2012/1433, dengan jurnalnya yang berjudul "*Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat : Analisis School Levy*" yang isinya ialah, *School levy* merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan model alternatif dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pencarian sumber pembiayaan pendidikan tambahan. Konsep dasar *school levy* yang dimaksud adalah sekolah yang pembiayaan pendidikannya didukung oleh pajak properti. Pajak properti adalah pajak

kekayaan yang dibayarkan oleh orang-orang yang relatif memiliki kelebihan/kekayaan. Orang-orang tersebut, dalam Islam termasuk ke dalam kelompok orang yang berkewajiban membayar zakat. Karena inti *school levy* adalah sekolah yang dibiayai oleh masyarakat, maka dalam Islam mirip dengan sekolah yang pembiayaan pendidikannya diambilkan dari potensi umat berupa pembayaran zakat, infak, sadakah, wakaf (Ziswa) dan yang sejenisnya. Dengan menerapkan model *school levy* berarti persoalan pembiayaan pendidikan yang selama ini masih belum memadai dapat diatasi dengan cara memberdayakan potensi umat (Islam) yang pada dasarnya memiliki konsep Ziswa apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan tersedia secara terus menerus.

3. Muhammad Abdul Rojak (1210201069), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2014, dengan skripsinya yang berjudul "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Penelitian di Yayasan Darul Inayah Cisarua Bandung Barat)*" dengan hasil penelitiannya bahwa pembiayaan yang dilakukan di Yayasan Darul Inayah tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi dari masyarakat, para donatur, dan dari sumbangan sukarela, maksudnya sumbangan yang diberikan kepada pihak yayasan seperti hibah, zakat, infak, sodaqah, waqaf, sumbangan material dan sumbangan bangunan. Yayasan ini mempunyai beberapa badan usaha salah satunya perkebunan sayuran dan Jamur Tiram, dan perternakan seperti perternakan Kambing, Sapi, Ayam

dan Bebek serta tempat-tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh anak-anak TK sehingga segala kebutuhan pendidikan di Yayasan Darul Inayah bisa terpenuhi diantara alokasinya dengan memberikan biaya gratis bagi peserta didik dan adanya beasiswa yang diberikan kepada peserta didik untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi.

4. Reni Marlinawati (1210201087), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2014 dengan skripsinya yang berjudul "*Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Terpadu Yapisa Cireundeu Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak*), dengan hasil penelitiannya bahwa pembiayaan yang dilakukan di MTs Terpadu Yapisa ini melakukan perencanaan dengan menyusun RAPBS (Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), dalam pelaksanaannya dilakukan penyeimbang antara Anggaran Belanja Sekolah (ABS) dan Anggaran Pendapatan Sekolah (APS) dan mengantisipasi minimnya dana dengan langkah skala prioritas dan program wirausaha. Faktor yang menjadi penghambata adalah sering terlambatnya dana dari pemerintah. Adapun hasil dari pelaksanaan manajemen pembiayaan madrasah di MTS Terpadu Yapisa adalah meningkatnya mutu pembelajaran secara efektif, meningkatnya kinerja guru, dan tercapainya tujuan satuan pendidikan secara efektif.
5. Hana Sonia Winayati (1211201031), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2014 dengan skripsinya yang berjudul "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah (Penelitian di Madrasah Aliyah Al-Muthohar Plered-Purwakarta)*), dengan

hasil penelitiannya bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan dimulai dengan melakukan penyusunan anggaran kegiatan madrasah, pelaksanaan pembiayaannya dengan mengalokasikan sumber dana yang ada sesuai dengan anggaran yang ada, evaluasi dan pertanggungjawabannya dilakukan secara *akuntabel*, transparan dan benar dengan melakukan penyusunan dan membuat laporan penggunaan dana, faktor penunjang dan penghambatnya ialah dari tenaga kependidikan, orang tua dan siswa yang dapat memperlambat dan memperlancar pembiayaan di MA. Al-Muthohhar, hasil yang dicapainya yaitu manajemen pembiayaan ang transparan dan *akuntabel*.

6. Anang Afriana (206200009), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2013 dengan skripsinya yang berjudul "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Al-Hasbillah Cisompet Garut)*", dengan hasil penelitiannya adalah Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTS, Al-Hasbillah Cisompet Garut pada intinya melalui tahapan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan pembiayaan madrasah (ABM) dilakukan dengan rapat seluruh komponen Madrasah, b) Pelaksanaan pembiayaan madrasah yaitu dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran,
 - c) Pengawasan pembiayaan madrasah dilakukan oleh *Mudirul 'Am* dan Kepala Madrasah, d) Faktor penunjang dan pengambat manajemen pembiayaan di MTS, Al-Hasbillah Cisompet Garut merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan madrasah, e) Hasil yang telah dicapai yaitu

memiliki lulusan yang berprestasi ketika dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam skripsi ini fokus penelitiannya berbeda dengan skripsi yang sebelumnya, yaitu lebih fokus ke zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang disalurkan dari Lembaga Rumah Zakat ke SMP Juara Kota Bandung, meskipun SMP Juara juga menerima sumber pembiayaan dari pemerintah berupa BOS namun hal itu tidak terlalu besar karena yang mendominasi adalah pembiayaan yang bersumber dari zakat, dan dalam skripsi ini membahas proses manajemen, mekanisme, dan penyaluran/alokasi-alokasi dana yang di dapatkan SMP Juara dari Lembaga Rumah Zakat itu sendiri serta keberhasilan-keberhasilan yang diraih SMP Juara Kota Bandung selama menerima sumber dana dari Lembaga Rumah Zakat. Namun ada pula kesamaan-kesamaan dengan skripsi yang telah disebutkan ialah dari segi konsep dasar tentang manajemen pembiayaan pendidikan secara umum.